



ANALISIS GEOSTRATEGI AFRIKA SELATAN SEBAGAI *REGIONAL POWER* DALAM KERANGKA UBUNTU DIPLOMACY TERHADAP REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Bintang Corvi Diphda^{*1}, Alia Rahma Putri Sinaga², Putri Alyaa Safira³,
Gertha Maria Gultom⁴, Yoga Ramadhani⁵, Angelique Kishiola Prima Foraihmbarsi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Corresponding Author: bintangcorvi058@gmail.com

Info Article	<p>Abstract: <i>This article analyzes South Africa's geostrategy as a regional power through the application of Ubuntu Diplomacy toward the Democratic Republic of the Congo (DRC) during the 2011–2022 period. The study aims to explain how South Africa's border stability enables power projection toward a non-contiguous state and how Ubuntu Diplomacy frames this practice as a normative foreign policy framework. The research adopts a case study design with a qualitative approach. The analysis is grounded in Jakub J. Grygiel's geostrategic framework by examining South Africa's state borders and levels of border pressure. The study then maps South Africa's power projection in the DRC through diplomatic-political, military, and economic instruments. The findings demonstrate that border stability reduces defensive pressures and creates strategic space for long-distance power projection. In this context, Ubuntu Diplomacy functions as a normative legitimizing framework that supports South Africa's foreign policy orientation and its regional role in promoting stability.</i></p> <p>Abstrak: Artikel ini menganalisis geostrategi Afrika Selatan sebagai <i>regional power</i> melalui penerapan Ubuntu Diplomacy terhadap Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2011–2022. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana stabilitas perbatasan Afrika Selatan memungkinkan terjadinya <i>power projection</i> ke negara yang tidak berbatasan langsung, serta bagaimana Ubuntu Diplomacy membingkai praktik tersebut sebagai kerangka normatif kebijakan luar negeri. Penelitian menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Analisis didasarkan pada kerangka geostrategi Jakub J. Grygiel, khususnya melalui penilaian terhadap kondisi <i>state borders</i> dan tingkat <i>border pressure</i> Afrika Selatan. Selanjutnya, penelitian memetakan bentuk <i>power projection</i> Afrika Selatan di RDK melalui instrumen diplomatik-politik, militer, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas perbatasan Afrika Selatan menurunkan kebutuhan defensif internal dan membuka ruang bagi proyeksi kekuatan jarak jauh. Dalam konteks ini, Ubuntu Diplomacy berfungsi sebagai kerangka legitimasi normatif yang menopang arah kebijakan dan peran Afrika Selatan dalam stabilitas kawasan.</p>
Received :	
02 November 2025	
Revised :	
02 Desember 2025	
Accepted :	
03 Januari 2026	
Publication :	
31 Januari 2026	
Keywords:	
Geostrategy, Power Projection, South Africa	
Kata Kunci:	
Geostrategy, proyeksi kekuatan, Afrika Selatan	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License	

INTRODUCTION

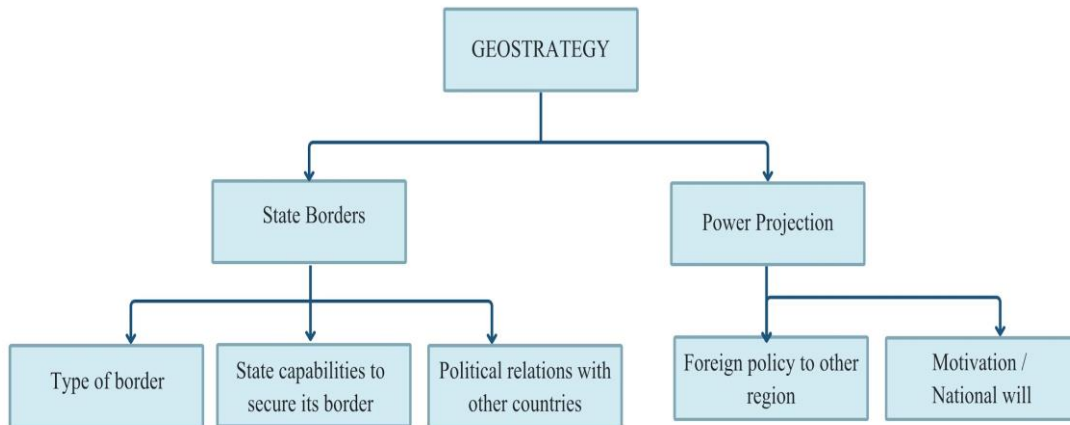
Afrika Selatan adalah *regional power* di kawasan Afrika bagian Selatan (Flemes, 2009; Godehardt & Nabers, 2011). Klaim ini didukung oleh kapasitas Afrika Selatan baik secara ekonomi dan militer. Afrika Selatan sendiri merupakan negara dengan PDB terbesar di benua Afrika (Statista, 2025). Selain itu, melansir dari *Global Firepower Index* (2025), kekuatan militer Afrika Selatan berada pada peringkat keempat di antara seluruh negara di Benua Afrika. Selain kapasitas militer dan ekonomi, Afrika Selatan juga mempunyai orientasi *foreign policy* yang memandang kepentingan regional dan internasional sebagai perluasan dari kepentingan nasional (Adebajo & Virk, 2017; Habib, 2009). Sehingga, Afrika Selatan memposisikan dirinya sebagai wakil suara Afrika di forum global yang tercermin dari posisinya sebagai satu-satunya wakil Afrika di G20 dan sebagai negara Afrika pertama yang bergabung dalam BRICS (Geldenhuys, 2016; Leininger, 2017).

Afrika Selatan juga memainkan peran penting dalam organisasi kawasan, seperti dalam African Union (AU) serta Southern African Development Community (SADC), peran sentral Afrika Selatan dalam dua organisasi kawasan ini kemudian semakin memperkuat pengaruh dari Afrika Selatan di kawasan Afrika (Habib, 2009). Selain itu, pengaruh Afrika Selatan juga diperkuat dengan adanya relasi asimetris dengan negara-negara tetangganya. Afrika Selatan banyak menjadi tujuan utama mobilitas tenaga kerja dan akses layanan kebutuhan dasar dari warga negara seperti Zimbabwe, Lesotho, Mozambique yang kemudian membuat negara-negara tersebut bergantung secara ekonomi pada Afrika Selatan (Smith & Mabera, 2024). Dalam konteks tersebut, sejak 2011, Afrika Selatan kemudian mempertegas kerangka *foreign policy*-nya dengan diterbitkannya dokumen *White Paper Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu* (South African Government, 2011). Dokumen ini menjelaskan bahwa Afrika Selatan menempatkan prinsip *ubuntu* sebagai landasan normatif dalam implementasi *foreign policy* yang memberikan penekanan pada prinsip kerja sama, kemitraan, *human security*, dan *good international citizen*. Dalam kerangka ini, Afrika Selatan menegaskan bahwa stabilitas dan kemakmuran di kawasan benua Afrika adalah bagian dari kepentingan nasionalnya. Pada periode 2011-2022, *White Paper* tersebut kemudian menjadi acuan strategis yang membentuk arah *foreign policy* Afrika Selatan. Dalam konteks ini, *foreign policy* Afrika Selatan tidak lagi hanya difokuskan pada wilayah terdekat negara Afrika Selatan. Akan tetapi, Afrika Selatan mulai memfokuskan *foreign policy*-nya dengan mengalokasikan sumber daya diplomatik, militer, dan ekonomi

untuk melakukan *power projection* ke negara yang posisinya tidak langsung berdekatan dengan negaranya yaitu ke Republik Demokratik Kongo (RDK). Pemilihan RDK sebagai salah satu negara tujuan *power projection* Afrika Selatan didorong oleh kombinasi faktor ekonomi dan politik.

Dalam konteks fenomena tersebut, berbagai macam kajian telah membahas fenomena implementasi *foreign policy* Afrika Selatan terhadap RDK (Hadebe & Dlamini, 2019; Mlambo & Adetiba, 2019; Namangale, 2015). Namun, belum ada kajian yang secara spesifik membahas bagaimana *foreign policy* Afrika Selatan yang diarahkan ke RDK dilihat sebagai *geostrategy* Afrika Selatan untuk melakukan *power projection* ke wilayah yang secara geografis tidak berada langsung dengan perbatasan negara Afrika Selatan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengisi *gap* tersebut dengan dipandu pertanyaan penelitian: bagaimana implementasi *geostrategy* Afrika Selatan dalam kerangka *Ubuntu Diplomacy* terhadap Republik Demokratik Kongo? Hasil pembahasan dari artikel ini kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis tentang penjelasan bagaimana implementasi *geostrategy* Afrika Selatan dalam kerangka *Ubuntu Diplomacy* terhadap Republik Demokratik Kongo dianalisis dengan kerangka *geostrategy*.

Kerangka analisis yang digunakan dalam makalah ini merujuk pada pemikiran Jakub J. Grygiel (2011) dalam buku *Great Powers and Geopolitical Change*. Grygiel mendefinisikan *geostrategy* sebagai arah geografis dari *foreign policy* suatu negara. Secara lebih spesifik, *geostrategy* menjelaskan ke mana negara memusatkan *power projection*, baik dalam bentuk penempatan kekuatan militer maupun aktivitas diplomatik dan ekonomi. Asumsi dasarnya adalah bahwa sumber daya negara selalu terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu negara memproyeksikan *foreign policy* ke semua arah secara bersamaan. Negara harus memilih kawasan atau negara mana yang menjadi prioritas dan di mana sumber daya politik, militer dan ekonominya akan dikonsentrasikan. Grygiel juga menegaskan bahwa arah *geostrategy* tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis atau geopolitik. Pertimbangan ideologis, kepentingan kelompok domestik, serta preferensi pemimpin dapat mendorong negara untuk memusatkan perhatian ke kawasan tertentu meskipun secara geografis bukan yang paling menguntungkan. Dengan demikian, *geostrategy* dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor geografis dan geopolitik yang mempunyai dua variabel utama yaitu *state borders* dan *power projection*.



Gambar 1. Kerangka konseptual Geostrategy

Sumber: Grygiel, 2011

Dua variabel utama yang ditekankan Grygiel dalam *geostrategy* adalah *state borders* dan *power projection*. Asumsi dasarnya yaitu prioritas setiap negara adalah untuk melindungi integritas teritorial dari ancaman eksternal. Menurut Grygiel, *state borders* adalah ruang di mana ancaman militer, arus migrasi dan hubungan ekonomi lintas batas terwujud. Secara geografis, Grygiel kemudian membagi *state borders* menjadi beberapa *type of borders* seperti *land borders* dan *sea borders*. Menurut Grygiel, *land borders* dinilai lebih berisiko dibandingkan *sea borders*. *Land borders* atau perbatasan darat lebih mudah diakses dan lebih rentan terhadap operasi militer, penyelundupan dan migrasi tidak terkontrol. Di sisi lain, *sea borders* atau perbatasan laut relatif lebih aman karena serangan dari laut memerlukan operasi yang lebih kompleks dan mahal. Namun, tidak semua perbatasan darat sama. Perbatasan yang melewati pegunungan, hutan lebat, atau wilayah sulit dijangkau cenderung lebih stabil, sementara perbatasan di dataran terbuka tanpa penghalang alam lebih mudah menjadi arena konflik. Selanjutnya, *state borders* juga dilihat dari *state capabilities to secure its border* yang kemudian menjelaskan bagaimana kemudian perbatasan dipertahankan melalui kapasitas ekonomi dan juga militer suatu negara.

Di luar faktor geografis, Grygiel menyebutkan stabilitas perbatasan juga ditentukan oleh kualitas hubungan politik antar negara. Bagaimana *political relations with other countries*, apakah hubungan politik negara dengan negara sekitar rukun (*amity*) atau bermusuhan (*enmity*). Hubungan yang kooperatif dapat membuat perbatasan yang secara geografis rentan menjadi stabil, sedangkan hubungan yang penuh kecurigaan dapat menjadikan perbatasan yang tampak aman menjadi sumber ketegangan. Kombinasi *type of borders*, *state capabilities to secure its border*, dan

political relations with other countries di sepanjang *state borders* kemudian menciptakan tingkat tekanan perbatasan yang oleh Grygiel disebut sebagai *border pressure*. *Border pressure* yang tinggi muncul ketika negara menghadapi perbatasan darat yang mudah ditembus, ditambah hubungan politik yang konflikual atau tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar sumber daya militer, diplomatik dan ekonomi akan diarahkan untuk tujuan defensif di sekitar perbatasan. Kebijakan luar negeri cenderung berorientasi ke dalam atau ke lingkungan terdekat dan *power projection* negara tersebut menjadi terbatas pada kawasan yang berdekatan. Sebaliknya, ketika *state borders* relatif stabil dan *border pressure* rendah, negara memiliki ruang yang lebih besar untuk mengalihkan sumber dayanya ke luar.

Ancaman militer di perbatasan yang terkendali memungkinkan negara mengurangi prioritas pengamanan teritorial dan meningkatkan perhatian pada kawasan lain yang dianggap strategis, termasuk wilayah yang jauh dari perbatasannya. Dalam situasi ini, *geostrategy* negara tersebut cenderung bersifat *outward looking* dan *power projection* dapat menjangkau kawasan yang lebih luas. Dengan kata lain, tingkat keamanan perbatasan menjadi penentu seberapa jauh dan seberapa intensif negara mampu melakukan *power projection*. *Power projection* sendiri merujuk pada kemampuan negara untuk mempengaruhi keadaan di luar wilayah terdekatnya melalui kombinasi instrumen militer, diplomatik, dan ekonomi. *Power projection* suatu negara dapat dilihat dari bagaimana implementasi *foreign policy to other region*, dan apakah negara memiliki motivasi atau *national will* yang mendasari negara tersebut untuk melakukan *power projection*. Dalam kerangka Grygiel, kapasitas ini selalu dibaca bersama kondisi *state borders*. Negara dengan *border pressure* tinggi mungkin memiliki kekuatan militer besar, tetapi sulit memproyeksikannya secara jauh karena harus memfokuskan kebutuhan defensif di sekitar perbatasan. Sebaliknya, negara dengan perbatasan stabil meskipun kapasitas militernya lebih terbatas dapat memanfaatkan stabilitas tersebut untuk melakukan *power projection* yang lebih jauh.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini mengoperasionalisikannya pada studi kasus RDK dengan dua langkah analitis yang saling terkait. Pertama, analisis akan dilakukan pada kondisi *state borders* Afrika Selatan dengan enam negara tetangganya untuk menilai tingkat *border pressure* yang dialami oleh Afrika Selatan. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi *type of borders*, menilai *state capabilities to secure its border* melalui kapasitas dan praktik pengamanan perbatasan, serta mengevaluasi *political relations* Afrika Selatan dengan negara-negara tetangganya apakah cenderung

kooperatif (*amity*) atau bermusuhan (*enmity*). Kedua, artikel ini akan menganalisis *power projection* Afrika Selatan terhadap RDK dengan menautkan hubungan kausal antara stabilitas *state borders* yang kemudian membuat Afrika Selatan dapat melakukan *power projection* secara jauh. Pada tahap ini, analisis *power projection* terhadap RDK dipetakan melalui instrumen diplomatik-politik, militer, dan ekonomi, sekaligus menganalisis bagaimana faktor *national will* yang tercermin dalam orientasi kebijakan luar negeri yang dilandaskan pada prinsip Ubuntu Diplomacy mendorong Afrika Selatan untuk memusatkan *power projection* pada RDK.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menjelaskan implementasi *geostrategy* Afrika Selatan melalui Ubuntu Diplomacy di Republik Demokratik Kongo pada periode 2011-2015. Pemilihan periode ini didasarkan pada relevansi kebijakan pasca terbitnya White Paper Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu sebagai landasan normatif yang memperkuat arah foreign policy Afrika Selatan, sekaligus mencakup fase meningkatnya keterlibatan Afrika Selatan di RDK melalui instrumen politik-diplomatik, militer, dan ekonomi. Fokus studi kasus diarahkan untuk memahami hubungan kausal antara kondisi *state borders* Afrika Selatan dan *power projection* secara jauh. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan dan dokumen institusional yang relevan, serta literatur akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui *desk review* untuk memetakan kronologi keterlibatan Afrika Selatan di RDK, serta mengidentifikasi indikator yang diperlukan untuk menilai kondisi *state borders* Afrika Selatan dengan negara-negara tetangganya.

Analisis data dilakukan melalui *thematic analysis* untuk menautkan temuan dari sumber data dengan kerangka analisis. Artikel ini akan menggunakan *framework-guided analysis* berdasarkan kerangka Jakub J. Grygiel dengan dua variabel utama, yaitu *state borders* dan *power projection*. Pada tahap ini, kondisi *state borders* dianalisis melalui *type of borders*, *state capabilities to secure its border*, dan *political relations* dengan negara-negara tetangga untuk menilai tingkat *border pressure*, kemudian hasilnya dihubungkan dengan pola *power projection* Afrika Selatan di RDK melalui instrumen diplomatik-politik, militer, dan ekonomi, serta peran *national will* yang tercermin dalam orientasi kebijakan luar negeri berbasis Ubuntu Diplomacy.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

State Borders

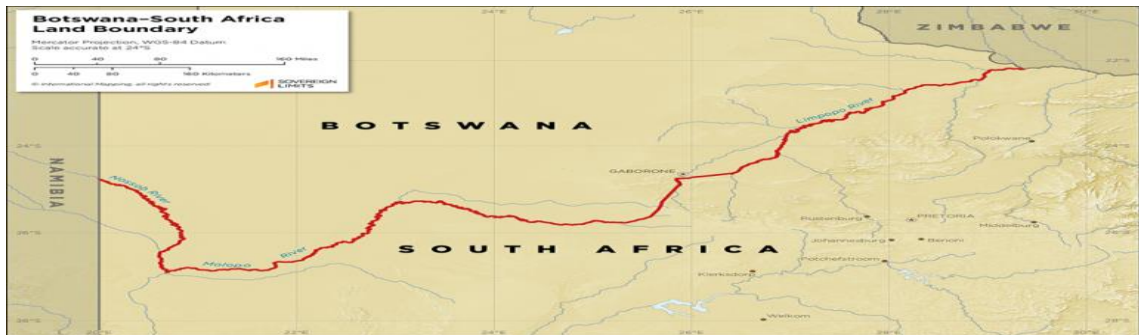
Dalam aspek *type of borders*, Afrika Selatan memiliki konfigurasi *state borders* yang didominasi oleh *land borders*. Secara keseluruhan, panjang *land borders* Afrika Selatan mencapai sekitar 4.862 km yang berbatasan dengan enam negara tetangga: Botswana (2,031 km), Namibia (967 km), Lesotho (909 km), Mozambique (491 km), Eswatini (430 km) dan Zimbabwe (225 km) (Gambar 2). Karakter perbatasan ini beragam, mulai dari wilayah gurun dan semak belukar di perbatasan barat dan utara, hingga kawasan pegunungan dan taman nasional di bagian timur. Di luar perbatasan darat tersebut, Afrika Selatan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 2.798 km yang membentang di antara Samudra Atlantik di sebelah barat dan Samudra Hindia di sebelah selatan dan timur. Meskipun demikian, Afrika Selatan tidak memiliki *sea borders* langsung dengan negara lain dan batas lautnya menghadap ke perairan internasional.



Gambar 2. Negara-Negara yang Berbatasan Dengan Afrika Selatan
Sumber: Wotela & Letsiri, 2015

Dalam aspek *state capabilities to secure its borders*, perbatasan *land borders* yang akan dibahas pertama adalah *land borders* Afrika Selatan dengan Botswana yang terletak di bagian utara hingga timur laut Afrika Selatan, membentang dari titik pertemuan tiga negara dengan Namibia di sebelah barat sampai titik pertemuan tiga negara dengan Zimbabwe di sebelah timur laut. Panjang perbatasan ini diperkirakan sekitar 2,031 km, sehingga menjadi perbatasan darat terpanjang yang dimiliki Afrika Selatan (Limits, 2023a). Secara fisik, sebagian besar garis batas melintasi wilayah semak belukar kering dan savana yang relatif jarang penduduk. Di sejumlah bagian, perbatasan mengikuti alur sungai seperti Sungai Nosob dan pada beberapa titik juga berkaitan dengan aliran Sungai Limpopo. Penandaan perbatasan secara fisik umumnya

berupa pagar ternak sederhana dan penanda perbatasan yang secara praktis mudah dilintasi, sehingga memberi ruang yang cukup besar bagi pergerakan lintas batas baik yang resmi maupun tidak resmi. Kapasitas Afrika Selatan dalam mengamankan perbatasannya (*state capabilities to secure its border*) dengan Botswana dapat dilihat dari dua aspek yaitu politik dan ekonomi. Dari sisi politik, hubungan antara Afrika Selatan dan Botswana ditandai oleh kombinasi kedekatan geografis, sejarah kolonial yang saling terkait dan upaya Botswana untuk mempertahankan otonomi politiknya. Botswana yang sebelumnya merupakan Protektorat Bechuanaland di bawah Inggris pernah dipertimbangkan untuk digabungkan ke dalam Uni Afrika Selatan pada awal abad ke-20, tetapi rencana tersebut tidak terwujud. Setelah Afrika Selatan menjadi republik pada 1961, warga Bechuanaland yang berstatus Subjek Inggris berubah menjadi warga negara asing di Afrika Selatan. Seiring berjalannya waktu, Botswana mengukuhkan posisinya sebagai negara merdeka yang menjalin hubungan bertetangga dengan Afrika Selatan, sambil tetap menjaga jarak politik, misalnya ketika memutuskan keluar dari Rand Monetary Area/Common Monetary Area pada 1977 untuk mengelola kebijakan moneternya sendiri (Klotz, 2016). Kedua negara kini sama-sama menjadi anggota organisasi regional seperti SADC dan SACU, dan juga bekerja sama dalam isu lintas batas tertentu, termasuk operasi penanggulangan penyelundupan komoditas bernilai tinggi (Scholvin, 2016).



Gambar 3. Perbatasan Afrika Selatan dengan Botswana
 Sumber: (Limits, 2023a)

Tabel 1. Neraca Ekspor dan Impor Negara-Negara di Afrika Bagian Selatan Tahun 2010-2011

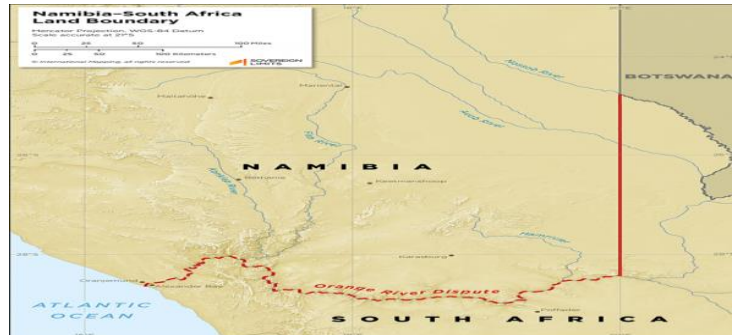
Country	Imports	Exports
Angola	1. Portugal 17.4% 5. South Africa 6.0%	1. China 42.8% -
Botswana	1. South Africa 80.1% 2. United Kingdom 6.9%	1. United Kingdom 58.2% 2. South Africa 17.1%
Comoros	1. Pakistan 16.2% 7. South Africa 4.2%	1. Singapore 36.0% -
DR Congo	1. South Africa 19.2% 2. China 12.5%	1. China 46.9% -
Kenya	1. China 14.8% 4. South Africa 7.8%	1. Uganda 10.0% -

Lesotho	1. South Korea 26.9%	1. United States 58.4%
Madagascar	1. China 14.6% 3. South Africa 6.4%	1. France 26.3% –
Malawi	1. South Africa 41.4% 2. Zambia 7.8%	1. India 10.4% 3. South Africa 7.5%
Mauritius	1. India 20.3% 4. South Africa 9.7%	1. United Kingdom 19.0% 6. South Africa 6.0%
Mozambique	1. South Africa 28.6% 2. China 10.3%	1. Netherlands 47.6% 2. South Africa 11.6%
Namibia	1. South Africa 69.4% 2. United Kingdom 9.3%	1. South Africa 33.4% 2. United Kingdom 17.2%
Seychelles	1. Saudi Arabia 21.1% 2. South Africa 8.4%	1. United Kingdom 19.0% –
Swaziland	1. South Africa 95.6% 2. Japan 0.9%	1. South Africa 59.7% 2. United States 8.8%
Tanzania	1. China 17.3% 3. South Africa 7.9%	1. China 15.6% –
Uganda	1. Kenya 15.3% 5. South Africa 5.6%	1. Sudan 15.0% –
Zambia	1. South Africa 35.0% 2. DR Congo 23.5%	1. Switzerland 51.3% 3. South Africa 9.2%
Zimbabwe	1. South Africa 58.0% 2. China 8.7%	1. DR Congo 14.8% 2. South Africa 13.4%

Sumber: Sören Scholvin, 2016

Kemudian, secara ekonomi, relasi antara Botswana dan Afrika Selatan berjalan cukup stabil. Botswana tergabung dalam *Southern African Customs Union* (SACU) dan mendapatkan porsi yang besar dari pendapatan bea masuk yang dikelola bersama dan dilaporkan dapat mencapai sekitar 30% anggaran nasional (Godehardt & Nabers, 2011). Ketergantungan perdagangan juga tinggi dengan sekitar 80,1% impor Botswana berasal dari Afrika Selatan, sementara sekitar 17,1% ekspor Botswana mengalir ke pasar Afrika Selatan pada 2010-2011 (Lihat Tabel 1) (Scholvin, 2016). Di luar perdagangan barang, hubungan lintas batas juga kuat dalam bidang tenaga kerja dan pendidikan. Sekitar 99% tenaga kerja Botswana yang bekerja di sektor pertambangan luar negeri pergi ke Afrika Selatan, dan sekitar 65% mahasiswa Botswana yang melanjutkan studi di luar negeri menempuh studi di perguruan tinggi Afrika Selatan (Hadebe & Dlamini, 2019; Scholvin, 2016). Kerja sama ekonomi juga tercermin dalam kemitraan perusahaan seperti Debswana, *joint venture* antara pemerintah Botswana dan perusahaan De Beers yang berbasis di Afrika Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Botswana dan Afrika Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi. Sehingga, hal ini membuat Afrika Selatan dapat mengamankan state borders dengan Botswana dengan efektif. Dalam aspek *political relations with other countries*, dari uraian terkait kondisi perbatasan Botswana dan Afrika Selatan, kondisinya relatif stabil dan bersifat *amity* dikarenakan secara politik kedua negara mempunyai relasi yang

sudah berlangsung baik dalam jangka waktu yang panjang serta terdapat ketergantungan ekonomi yang tinggi dari Botswana terhadap Afrika Selatan. Sehingga, secara relasi politik kedua negara tidak mempunyai potensi untuk berkonflik yang kemudian menjadi ancaman bagi Afrika Selatan.

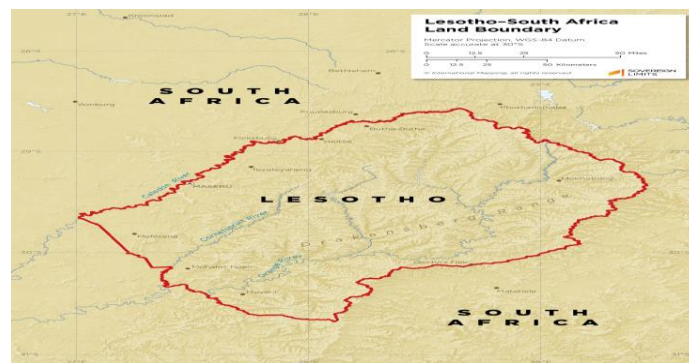


Gambar 4. Perbatasan Afrika Selatan dengan Namibia
Sumber: Limits, 2023c

State borders Afrika Selatan yang dibahas selanjutnya adalah dengan Namibia yang memiliki panjang sekitar 600 km, membentang dari pesisir Samudra Atlantik di sebelah barat hingga titik pertemuan tiga negara dengan Botswana di sebelah timur (Lihat Gambar 4). Secara geografis, sebagian besar garis batas ini mengikuti aliran Sungai Orange yang berfungsi sebagai batas alam di antara kedua negara. Wilayah perbatasan didominasi oleh dataran gurun yang kering, dengan kepadatan penduduk yang rendah dan medan yang relatif sulit dijangkau. Sungai Orange menjadi fitur geografis utama di kawasan ini, bukan hanya sebagai garis batas, tetapi juga sebagai sumber daya air di tengah lingkungan yang umumnya gersang (Limits, 2023e). Di sejumlah segmen, perbatasan ditandai oleh pagar dasar atau bahkan tidak berpagar sama sekali, dengan akses yang terbatas melalui jalur kendaraan jip dan titik-titik penyeberangan resmi.

Dalam *state capabilities to secure its border* dengan Namibia, dari sisi politik, hubungan Afrika Selatan-Namibia ditopang oleh jaringan tata kelola yang berkaitan dengan perairan perbatasan dan pengelolaan sumber daya air terutama di Sungai Orange (Hennop et al., n.d.). Hal ini mencerminkan pentingnya Sungai Orange sebagai sumber air strategis yang menopang kegiatan ekonomi dan pemukiman di kedua sisi perbatasan. Selain itu, terdapat forum Forum Penghubung Lintas Batas (Crossborder Liaison Forums) yang memfasilitasi komunikasi rutin antara aparat perbatasan kedua negara untuk membahas isu-isu seperti penyeberangan ilegal dan kejahatan lintas batas. Interaksi sehari-hari di pos perbatasan memperkuat hubungan kerja antara otoritas keamanan. Hal ini kemudian memunculkan interaksi yang berulang dan cenderung

stabil antara Namibia dan Afrika Selatan. Secara ekonomi, Namibia dan Afrika Selatan terikat dalam beberapa kerangka kerja sama penting. Namibia merupakan anggota SADC, SACU, dan Common Monetary Area (CMA), dengan mata uang nasional yang dipatok langsung pada rand Afrika Selatan (Kappel, 2010). Ketergantungan ekonomi Namibia terhadap Afrika Selatan cukup besar, dengan sekitar 69,4% total impor berasal dari Afrika Selatan (Lihat Tabel 2). Di sektor sumber daya alam, perusahaan Afrika Selatan berperan besar melalui kemitraan di industri pertambangan berlian, sementara infrastruktur seperti Trans-Kalahari Corridor yang menghubungkan Gauteng dengan pelabuhan Walvis Bay menunjukkan kedalaman integrasi transportasi dan logistik kedua negara. Selain itu, terdapat *interest* dari Afrika Selatan terhadap pemanfaatan gas alam Namibia melalui rencana pembangunan pipa ke Saldanha, yang semakin menegaskan bahwa perbatasan ini tidak hanya penting sebagai garis batas teritorial, tetapi juga sebagai simpul hubungan ekonomi dan sumber daya yang strategis. Dalam aspek *political relations with other countries*, relasi politik antara Namibia dan Afrika Selatan relatif stabil dan bersifat *amity*. Hal ini didukung dengan adanya ketergantungan ekonomi yang kuat dan juga stabilitas hubungan politik antara kedua negara dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini membuat Namibia bukan menjadi ancaman bagi Afrika Selatan.



Gambar 5. Perbatasan Afrika Selatan dengan Lesotho
Sumber: (Limits, 2023c)

State borders selanjutnya adalah antara Afrika Selatan dan Lesotho (Lihat Gambar 5). Lesotho memiliki posisi geografis yang unik karena merupakan negara *enclave* yang seluruh wilayah daratnya dikelilingi oleh Afrika Selatan. Secara topografis, negara ini didominasi oleh lembah dan pegunungan, dengan dataran rendah berada di ketinggian sekitar 1.800 meter dan puncak pegunungan yang melampaui 3.000 meter. Bagian perbatasan Afrika Selatan-Lesotho mencakup kawasan Pegunungan Drakensberg dan dataran tinggi yang curah hujannya relatif tinggi

dibanding wilayah sekitarnya. Kondisi ini menjadikan Lesotho salah satu kawasan penting sebagai sumber air bagi Afrika Selatan. Potensi tersebut diwujudkan melalui Lesotho Highlands Water Project (LHWP), sebuah proyek kerja sama besar yang mencakup pembangunan enam bendungan, jaringan terowongan sepanjang sekitar 225 kilometer, ratusan kilometer jalan beraspal dan pembangkit listrik tenaga air (Coplan, 2001). Melalui LHWP, air dari dataran tinggi Lesotho dialirkan ke Free State dan Gauteng dengan kapasitas sekitar 30 meter kubik per detik, sementara Lesotho memperoleh pendapatan dari penjualan air serta pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Muela (Scholvin, 2016).

Dalam *state capabilities to secure its border* dengan Lesotho, Secara ekonomi, ketergantungan Lesotho terhadap Afrika Selatan tinggi yang membuat Afrika Selatan mempunyai kapasitas yang besar untuk mengamankan *state borders* dengan Lesotho. Lesotho merupakan anggota Southern African Customs Union (SACU), di mana pendapatan yang diperoleh dari skema bea masuk bersama dilaporkan mencapai sekitar 80% dari anggaran nasional Lesotho. Ketergantungan ekonomi yang begitu besar ini menunjukkan hubungan Lesotho yang bergantung dengan Afrika Selatan dalam memastikan stabilitas ekonomi (Scholvin, 2016). Negara ini juga termasuk dalam *Common Monetary Area* (CMA), dengan mata uang yang dipatok satu banding satu terhadap rand Afrika Selatan sejak 1974 (Scholvin, 2016). Di bidang tenaga kerja, Lesotho sejak lama berperan pemasok buruh migran untuk pertambangan dan sektor lain di Afrika Selatan. Pangsa penambang Basotho yang bekerja di tambang emas Afrika Selatan meningkat dari 20% pada tahun 1970-an menjadi 50% pada tahun 1990-an (Scholvin, 2016). Walaupun kontribusi remitansi terhadap pendapatan nasional menurun dari sekitar 42% (1990) menjadi 18% (2002), migrasi tenaga kerja tetap menjadi salah satu strategi bertahan hidup utama bagi masyarakat Lesotho (Mamokhere & Chauke, 2020). Di sisi lain, kota-kota perbatasan di Free State Afrika Selatan bergantung pada konsumen dari Lesotho untuk aktivitas perdagangan dan jasa, termasuk perbankan. Hal ini tentu kemudian membuat Afrika Selatan dapat secara efektif untuk *secure its borders* dengan Lesotho. Dari segi *political relations with other countries*, hubungan Lesotho dengan Afrika Selatan sempat dipenuhi oleh intervensi dan ketegangan domestik. Setelah pemilu 1998 yang memicu krisis politik dan pemberontakan sebagian anggota militer, pemerintah Lesotho meminta bantuan SADC. Intervensi yang kemudian dikenal sebagai Operasi Boleas melibatkan sekitar 600 tentara Afrika Selatan dan 200 tentara Botswana, dengan tujuan memulihkan ketertiban

serta mengamankan infrastruktur vital seperti Bendungan Katse yang memasok air ke Gauteng (Scholvin, 2016). Hal ini kemudian memunculkan ketergantungan secara politik dari Lesotho terhadap Afrika Selatan. Hal tersebut juga didukung dengan oleh Afrika Selatan yang mengalokasikan dana sebesar (ZAR 5,6 juta) atau sekitar (US\$306,000) untuk memfasilitasi proses perdamaian Lesotho pada tahun 2022 (Smith & Mabea, 2024). Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, *political relations* Afrika Selatan dan Lesotho berlangsung secara stabil dan bersifat *amity* dikarenakan peran Afrika Selatan yang dominan dalam menjaga stabilitas politik di Lesotho yang kemudian membuat Lesotho mempunyai ketergantungan secara politik terhadap Afrika Selatan.

Selanjutnya akan dibahas perbatasan Afrika dan Mozambique. Secara geografis, perbatasan Afrika Selatan dengan Mozambique terletak di sisi timur laut Afrika Selatan dengan panjang sekitar 496 km, membentang dari titik pertemuan tiga negara dengan Zimbabwe di utara hingga pesisir Samudra Hindia dekat Kosi Bay di selatan (Lihat Gambar 6). Secara geografis, garis batas ini melintasi wilayah Lowveld dan rangkaian Pegunungan Lebombo, serta memotong bagian timur Taman Nasional Kruger, di mana sebagian pagar perbatasan telah dihilangkan untuk memfasilitasi migrasi satwa liar. Di sepanjang perbatasan terdapat kombinasi penanda alam dan pagar buatan, dengan beberapa pos lintas batas utama seperti Kosi Bay/Farazela di bagian selatan dan Lebombo-Ressano Garcia di bagian tengah yang menjadi simpul penting pergerakan orang dan barang. Koridor ini terintegrasi dengan *Maputo Development Corridor* dan *Lubombo Spatial Development Initiative (LSDI)* yang menghubungkan pusat industri Gauteng dan kawasan Durban dengan Pelabuhan Maputo melalui jaringan jalan beraspal yang selesai pada awal 2000-an, sehingga menjadikan Maputo sebagai salah satu pintu gerbang maritim utama bagi Afrika Selatan dan kawasan sekitarnya (Maharaj et al., 2016).



Gambar 6. Perbatasan Afrika Selatan dengan Mozambique
Sumber: (Limits, 2023d)

Dalam *state capacity to protect its border* pada aspek keamanan, perbatasan Afrika Selatan-Mozambique termasuk salah satu yang paling kompleks di kawasan Afrika bagian selatan. Jalur perbatasan ini pernah digunakan sebagai rute penyelundupan senjata api yang memanfaatkan gudang senjata (*arms caches*) sisa perang saudara Mozambique yang tidak sepenuhnya dimusnahkan (Peberdy, 2000). Untuk merespons hal ini, kedua negara menjalankan Operasi Rachel, sebuah kerja sama formal yang berfokus pada pencarian dan penghancuran gudang senjata di Mozambique yang dalam beberapa operasi awal berhasil memusnahkan hampir 12 ribu senjata api (Limits, 2023d).

Selain senjata, perbatasan ini juga menjadi jalur penyelundupan narkoba, kendaraan curian, serta arus migrasi tidak terdokumentasi, sementara penghilangan pagar di sebagian Taman Nasional Kruger membuka peluang bagi aktivitas perburuan liar lintas batas (Wotela & Letsiri, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, dimensi keamanan kerja sama ini diperluas ke level regional melalui kontribusi Afrika Selatan dalam misi keamanan SADC di Mozambique, khususnya untuk membantu pemerintah menghadapi ancaman kekerasan ekstremis di provinsi Cabo Delgado yang semakin menegaskan bahwa perbatasan ini merupakan ruang interaksi yang intens antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan kedua negara.

Kemudian, secara ekonomi, hubungan Afrika Selatan-Mozambique cukup erat dan asimetris. Sebelum kemerdekaan Mozambique, perekonomian negara tersebut bergantung pada remitansi pekerja migran yang bekerja di tambang dan sektor pertanian Afrika Selatan, serta pada penggunaan Pelabuhan Maputo untuk kebutuhan ekspor-impor Afrika Selatan (Scholvin, 2016). Pada 1996, sekitar 15,8% ekspor Mozambique ditujukan ke Afrika Selatan, sementara sekitar 54,6% impornya berasal dari Afrika Selatan yang angkanya mulai menurun di 2010-2011 dengan impor sebesar 28.6% dan ekspor sebesar 11.6% (Lihat Tabel 1). Selain perdagangan, investasi Afrika Selatan memainkan peranan kunci melalui proyek-proyek besar seperti Mozal, smelter aluminium yang dikendalikan BHP Billiton yang menyumbang porsi besar pada ekspor Mozambique (Scholvin, 2016). Di sisi lain, remitansi pekerja migran asal Mozambique yang bekerja di Afrika Selatan dilaporkan mencapai sekitar ZAR 433 juta pada 2005, atau sekitar 3,6% PDB Mozambique yang menggarisbawahi kedalaman keterkaitan ekonomi dan sosial kedua negara (Scholvin, 2016). Oleh karena adanya ketergantungan secara keamanan dan ekonomi dari Mozambique terhadap Afrika Selatan, dan berdasar

pada beberapa kerjasama keamanan yang sudah dilakukan, Afrika Selatan mempunyai kapasitas untuk *secure its border* dengan Mozambique.

Dalam aspek *political relations with other countries*, berdasarkan uraian terkait kondisi perbatasan Afrika Selatan dan Mozambique, relasi politik kedua negara dapat dikatakan baik dengan pernah dilakukannya kerjasama untuk menumpas penyelundupan senjata secara ilegal melalui operasi Rachel. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara mempunyai hubungan politik yang baik karena bisa bekerjasama untuk mengatasi isu di perbatasan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa *political relations* antara Afrika Selatan dan Mozambique relatif bersifat *amity* meskipun terdapat beberapa praktik penyelundupan senjata. Namun hal ini bukan menjadi ancaman yang serius untuk Afrika Selatan karena bukan merupakan ancaman yang berasal langsung dari ketegangan politik dengan pemerintah Mozambique.



Gambar 7. Perbatasan Afrika Selatan dengan Eswatini
Sumber: Sovereign Limits, 2023

Perbatasan selanjutnya adalah antara Afrika Selatan dan Eswatini (Lihat Gambar 7). Eswatini (sebelumnya Swaziland) berbagi perbatasan darat sepanjang kurang lebih 444 km dengan Afrika Selatan. Secara geografis, garis batas ini mengelilingi Eswatini dari sisi barat, selatan dan utara, sementara sisi timurnya berbatasan dengan Mozambik. Secara topografis, wilayah Eswatini terbagi dalam zona Highveld (1.000-1.200 meter), Midveld (600-1.000 meter), dan Lowveld (300-600 meter), dengan bagian Highveld yang berdekatan dengan Afrika Selatan ditandai oleh perbukitan dan pegunungan serta curah hujan yang relatif tinggi, sekitar 1.250 mm per tahun. Perbatasan didominasi perbukitan dan padang rumput bergelombang dan pegunungan yang di beberapa titik hanya ditandai oleh pagar dan penanda sederhana (Limits, 2023b). Terdapat 11 pos lintas batas resmi, dengan Oshoek-Ngwenya sebagai jalur utama yang menghubungkan Eswatini dengan Afrika Selatan dan dekat dengan ibu kota Mbabane. Lintasan ini

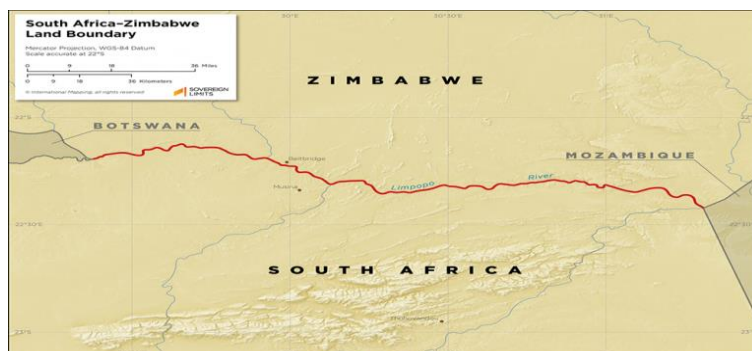
menampung arus harian untuk mobilisasi orang dan barang yang cukup padat untuk keperluan kerja, perdagangan, dan mobilitas rutin kedua masyarakat.

Dalam *state capacity to protect its border*, secara ekonomi, Eswatini dengan Afrika Selatan mempunyai hubungan yang relatif baik. Afrika Selatan telah menjadi mitra dagang utama bagi Eswatini, pada tahun 2010-2011 sekitar 95,6% impor Eswatini berasal dari Afrika Selatan, sementara sekitar 59,7% eksportnya kembali mengalir ke pasar Afrika Selatan (Lihat Tabel 1). Eswatini juga adalah anggota pendiri Southern African Customs Union (SACU) dan bagian dari Common Monetary Area (CMA), dengan mata uang lilangeni yang dipatok 1:1 terhadap rand, dan rand sendiri berlaku sebagai alat pembayaran sah di Eswatini (Scholvin, 2016). Ketergantungan ini juga terlihat di sektor energi, di mana 80-85% konsumsi listrik Eswatini diimpor dari Eskom Afrika Selatan. Selain itu, perusahaan Afrika Selatan seperti Xstrata aktif dalam penambangan batu bara di Eswatini dan jaringan kereta api negara ini terhubung langsung dengan pelabuhan Durban dan Richards Bay yang memperkuat posisi Eswatini sebagai bagian dari hinterland ekonomi Afrika Selatan.

Di bidang keamanan, perbatasan Afrika Selatan-Eswatini menghadapi sejumlah tantangan, meskipun kerangka kerja sama regional sudah banyak dikembangkan. Wilayah perbatasan di utara KwaZulu-Natal yang berbatasan dengan Eswatini dan Mozambik dikenal sebagai salah satu rute transit penting untuk senjata api ilegal, migran ilegal dan berbagai bentuk penyelundupan barang. Aparat keamanan kedua negara menjawab tantangan ini melalui operasi bersama seperti Operasi Umlambo (1999) yang menarget kendaraan curian dan dibajak, serta melalui penguatan patroli karena perbatasan ini diklasifikasikan sebagai *priority two* oleh SANDF (Hennop et al., n.d.). Sehingga, dengan adanya upaya dan relasi ekonomi tersebut memungkinkan bagi Afrika Selatan untuk *protect its border* yang berbatasan dengan Eswatini.

Dalam aspek *political relations with other countries*, Afrika Selatan dan Eswatini mempunyai relasi yang relatif stabil. Berdasarkan uraian terkait kondisi di perbatasan Afrika Selatan dan Eswatini, kedua negara sudah pernah melakukan kerjasama dalam sektor keamanan dan secara historis kedua negara tidak mempunyai rekam jejak konflik atau ketegangan politik. Meskipun terdapat beberapa isu terkait penyelundupan senjata dan transaksi ilegal, namun upaya pengentasan permasalahan tersebut terus dilakukan dengan kerjasama oleh kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan dan Eswatini mempunyai hubungan politik yang stabil sehingga membuat *political relations* antara Afrika Selatan dan Eswatini bersifat *amity* karena tidak ada ancaman

secara langsung dari tensi politik antara Afrika Selatan dan Eswatini. Perbatasan terakhir yang dibahas adalah perbatasan Afrika Selatan dengan Zimbabwe. Perbatasan ini relatif pendek tetapi strategis dengan panjang sekitar 233 km yang seluruhnya mengikuti alur Sungai Limpopo. Sungai ini memiliki karakter aliran yang berfluktuasi dan pada banyak periode dapat diseberangi dengan berjalan kaki, sehingga secara fisik tidak menjadi penghalang yang kokoh bagi pergerakan manusia maupun barang. Di sepanjang bagian ini hanya terdapat satu pos lintas batas resmi yaitu pos Beitbridge yang merupakan salah satu titik penyeberangan darat tersibuk di Afrika sub-Sahara. Beitbridge terhubung dengan North-South Corridor yang menghubungkan pelabuhan Durban dengan kawasan industri Gauteng, lalu menerus ke Francistown, Harare, hingga Lubumbashi dan Dar es Salaam (Scholvin, 2016). Jalur ini menjadi tulang punggung pergerakan barang di Afrika bagian selatan.



Gambar 8. Perbatasan Afrika Selatan dengan Zimbabwe
Sumber: Sovereign Limits, 2023

Dari aspek *state capacity to protect its borders*, perbatasan Afrika Selatan dengan Zimbabwe dipengaruhi oleh konteks krisis ekonomi dan politik berkepanjangan di Zimbabwe sejak awal 2000-an. Kondisi tersebut mendorong arus migrasi massal ke Afrika Selatan, baik secara legal maupun tanpa dokumen (Scholvin, 2016). Pada tahun 2010, sekitar empat juta warga Zimbabwe pernah bermukim di Afrika Selatan baik secara legal maupun ilegal (Williams, 2002). Hal ini juga didukung oleh faktor geografis perbatasan Limpopo yang relatif mudah diseberangi sehingga turut memfasilitasi migrasi ilegal di samping berbagai aktivitas ilegal lain seperti penyelundupan narkoba, pencurian dan peredaran kendaraan curian, pencurian ternak, dan perdagangan senjata. Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, perbatasan Beitbridge antara Afrika Selatan dan Zimbabwe dikelola dalam kerangka kerja sama regional SADC. Pemerintah Afrika Selatan mengembangkan kebijakan pos lintas batas satu atap (*One Stop Border Post*) di Beitbridge bersama Zimbabwe untuk

menyederhanakan prosedur imigrasi dan kepabeanan, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi koridor perdagangan. Pada saat yang sama, tekanan domestik terkait isu keamanan dan ekonomi mendorong pendekatan yang lebih ketat terhadap imigrasi, termasuk kebijakan deportasi terhadap migran ilegal dari Zimbabwe. Hal ini kemudian situasi di perbatasan menjadi terkendali meskipun masih terdapat beberapa tindakan ilegal. Sehingga, Afrika Selatan mempunyai *capacity to protect its border* yang berbatasan langsung dengan Zimbabwe.

Dalam aspek *political relation*, secara umum *political relation* antara Afrika Selatan dan Zimbabwe relatif stabil. Hal ini didorong oleh faktor bahwa secara hubungan politik kedua negara tidak terdapat konflik atau sengketa yang berkepanjangan. Meskipun masih terdapat persoalan terkait migran ilegal dan persoalan aktivitas ilegal lainnya di perbatasan, pemerintah dari kedua negara tetap secara proaktif berupaya untuk bekerja sama dalam mengatasi persoalan ini (Moyo, 2019). Sehingga, hal ini menandakan bahwa *political relation* antara kedua negara cenderung bersifat *amity*. Secara keseluruhan, *type of borders* Afrika Selatan dengan ke-enam negara tetangganya adalah *land borders*. Kemudian, dalam aspek *state capacity to protect its borders*, Afrika Selatan menunjukkan upaya proaktif untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangganya guna mengatasi persoalan di perbatasan. Hal ini kemudian secara efektif dapat mengamankan wilayah perbatasan meskipun masih terdapat beberapa kasus penyelundupan orang, barang dan narkoba secara ilegal. Selanjutnya, dalam aspek *political relations with other countries*, hubungan politik Afrika Selatan dengan enam negara tetangganya menggambarkan relasi politik *amity*. Meskipun juga masih terdapat berbagai persoalan di perbatasan, Afrika Selatan berhasil membangun hubungan yang relatif stabil dengan negara-negara tetangga yang tercermin dalam kolaborasi politik, ekonomi, dan keamanan yang erat. Hubungan ini terlihat pada berbagai upaya penyelesaian sengketa lintas batas secara damai, serta kerja sama yang terjalin melalui organisasi-organisasi regional seperti SADC dan SACU.

Power Projection

Power projection dalam konteks Afrika Selatan merujuk pada sejauh mana negara ini menggunakan instrumen militer, ekonomi, dan diplomasi di luar wilayahnya. Berdasarkan kerangka Grygiel, tingkat stabilitas *state borders* menentukan arah dan jangkauan *power projection*. Negara dengan *state borders* yang relatif stabil dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk *power projection* jarak jauh,

sementara negara dengan *border pressure* tinggi cenderung memusatkan perhatian pada lingkungan terdekat demi menjaga keamanan dan stabilitas di sekitar wilayah domestik. Kondisi Afrika Selatan mencerminkan situasi *state borders* yang stabil sehingga memungkinkan negara ini untuk memfokuskan sumber daya pada *power projection* yang lebih jauh. Analisis terhadap kondisi *state borders* antara Afrika Selatan dengan keenam negara tetangganya menunjukkan tren yang relatif stabil dan bersifat *amity*. Meskipun terdapat beberapa persoalan di perbatasan seperti migrasi ilegal dan keamanan seperti penyelundupan senjata ilegal, narkoba dan lain sebagainya, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak mengancam kedaulatan pemerintah Afrika Selatan secara langsung. Selain itu, hubungan politik antara Afrika Selatan dengan para negara tetangganya relatif stabil. Terutama dengan adanya keuntungan geografis pada perbatasan Botswana dan Namibia yang mana wilayah perbatasan didominasi oleh gurun dan semak belukar dengan penghalang alam seperti Cekungan Kalahari dan Sungai Orange yang mengurangi risiko ancaman dari operasi militer konvensional. Oleh karena kondisi *state borders* yang relatif stabil, Afrika Selatan dapat melakukan *power projection* dengan jangkauan yang jauh.

Upaya untuk melakukan *power projection* secara jauh sebagai *geostrategy* Afrika Selatan diperkuat dengan diterbitkannya *White Paper on South Africa's Foreign Policy: Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu* pada 2011 yang menjadi arah strategis kebijakan luar negeri Afrika Selatan setelah tahun 2011 ke depan. Kerangka *foreign policy* ini didasarkan pada prinsip *Ubuntu*. *Ubuntu* didefinisikan sebagai pengakuan atas interkoneksi dan interdependensi Afrika Selatan dengan pihak lain dalam hubungan internasional. Sehingga, hal ini yang kemudian menjadi dasar *nation will* Afrika Selatan sebagai upaya untuk mempromosikan dan mendukung hubungan positif dengan negara-negara di kawasan Afrika. Selain itu, hal yang juga mendasari *nation will* Afrika Selatan adalah perubahan politik pasca-rezim apartheid setelah adanya penindasan panjang terhadap ras kulit hitam di Afrika Selatan (Klotz, 2016). Pasca-rezim apartheid runtuh, Afrika Selatan bertekad untuk memainkan peran yang lebih sentral di kawasan Afrika dan dunia internasional. Transisi dari rezim apartheid ke demokrasi multi-rasial menandai awal dari kebijakan luar negeri yang lebih inklusif dan proaktif (Geldenuys, 2016). Afrika Selatan kemudian berusaha untuk membangun citra internasional sebagai pembela hak asasi manusia dan keadilan sosial melalui *foreign policy* berbasis pada prinsip *Ubuntu* dan solidaritas. *White Paper* tersebut juga menegaskan bahwa Afrika Selatan adalah penerima manfaat dari solidaritas selama

perjuangan anti apartheid, sehingga negara ini meyakini bahwa apa yang diinginkannya bagi rakyatnya juga seharusnya diinginkan bagi warga dunia. Dalam kerangka tersebut, kepentingan regional dan internasional dari Afrika Selatan dipandang sebagai perluasan alami dari kepentingan nasionalnya (Geldenhuis, 2016). Prinsip ini dijalankan melalui orientasi pada kerja sama, penyelesaian sengketa secara damai, keadilan transisional, penghormatan terhadap hukum internasional, serta komitmen terhadap Pan-Afrikanisme dan solidaritas Selatan Selatan. Afrika Selatan memosisikan dirinya sebagai *bridge builder* yang berusaha menyeimbangkan antara tujuan dari kepentingan nasional dan respons terhadap tuntutan keadilan internasional.

White paper ini digunakan oleh Afrika Selatan sebagai arah strategis *foreign policy*-nya pada periode 2011-2022 yang kemudian mengalami pembaharuan pada tahun 2022. Oleh karena itu, periode 2011-2022 dapat dilihat sebagai fase ketika *White Paper Ubuntu Diplomacy* yang dikeluarkan pada 2011 diimplementasikan secara strategis sebagai sebuah *power projection* Afrika Selatan. Dalam periode tersebut, salah satu arah *power projection* dari Afrika Selatan adalah memperluas pengaruhnya ke Republik Demokratik Kongo yang berada di wilayah *central sub-Saharan Africa* (Gbaya, 2015). Dalam melakukan *power projection*, pemilihan RDK didasari oleh kombinasi faktor ekonomi yang strategis dan tujuan geopolitik di kawasan Afrika (Hadebe & Dlamini, 2019; Mlambo & Adetiba, 2019). RDK dipandang sebagai mitra kunci yang menyediakan sumber daya alam vital bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan. Secara geografis dan politik, RDK berada di wilayah Afrika sub-Sahara dan merupakan anggota SADC, sehingga stabilitas RDK dinilai berkaitan dengan stabilitas kawasan Afrika bagian Selatan yang menjadi lingkungan strategis utama Afrika Selatan

Salah satu faktor pendorong *power projection* Afrika Selatan ke RDK adalah kebutuhan untuk menjamin keamanan energi jangka panjang melalui proyek bendungan Grand Inga. Potensi tenaga air Sungai Kongo memberikan peluang bagi Afrika Selatan untuk mengatasi krisis listrik domestik yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Komitmen untuk membeli sekitar 2.500 MW listrik dari fase Inga 3 menunjukkan bahwa RDK diposisikan sebagai mitra strategis dalam agenda keamanan energi Afrika Selatan (Adebajo & Virk, 2017). Dengan demikian, *power projection* Afrika Selatan di RDK adalah bentuk upaya untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur energi tersebut dapat berjalan dalam konteks politik dan keamanan yang relatif stabil. Di luar sektor energi, RDK juga menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi ekspansi

korporasi Afrika Selatan. Perusahaan-perusahaan Afrika Selatan beroperasi di berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan emas, tembaga, dan berlian, hingga telekomunikasi, ritel modern, konstruksi, dan perbankan. Afrika Selatan menjadi pemasok barang dan jasa asing terbesar ke RDK dengan surplus perdagangan yang signifikan, Afrika Selatan menikmati surplus perdagangan sebesar R12,07 miliar (Rand) yang mengalami peningkatan sebesar 65,7% dari surplus tahun 2011 yang tercatat sebesar R7,93 miliar (Gbaya, 2015). Sehingga, Afrika Selatan menilai stabilitas domestik Kongo berimplikasi langsung terhadap keamanan investasi dan keberlanjutan keuntungan ekonomi bagi aktor-aktor bisnis Afrika Selatan. Dalam konteks ini, *power projection* ke RDK juga didasari oleh tujuannya perlindungan aset dan pasar.

Selain faktor ekonomi, ada dimensi dari *national will* Afrika Selatan yang ikut mendorong keterlibatan Afrika Selatan di RDK. Sejak berakhirnya apartheid, Afrika Selatan berupaya memosisikan diri sebagai pemimpin kawasan yang mampu menyediakan solusi atas konflik dan krisis di Afrika (Geldenhuis, 2016). Kegagalan proses perdamaian di RDK bukan hanya mengancam stabilitas subkawasan, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas Afrika Selatan sebagai mediator dan penyedia *African solutions to African problems*. Dengan terlibat secara aktif dalam konfigurasi keamanan di RDK, Afrika Selatan berusaha menunjukkan bahwa Ubuntu Diplomacy tidak berhenti pada retorika solidaritas, tetapi juga diwujudkan dalam kemampuan nyata mengelola konflik bersenjata dan transisi politik di kawasan. Cara Afrika Selatan melakukan *power projection* di RDK terlihat jelas dari dukungan politik yang diberikan kepada pemerintahan Joseph Kabila, terutama pada pemilu 2011. Afrika Selatan mengalokasikan dukungan finansial dan logistik yang besar untuk penyelenggaraan pemilu, mulai dari pembiayaan hingga dukungan transportasi militer untuk distribusi logistik (Tonheim & Swart, 2015). Setelah pemilu yang banyak mendapat kritik terkait kredibilitas, Afrika Selatan dengan cepat mengakui kemenangan Kabila dan melalui mekanisme regional menyatakan pemilu tersebut sebagai keberhasilan. Praktik ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan bersedia mengutamakan stabilitas rezim di RDK demi menjaga kesinambungan proyek ekonomi dan energi.

Dimensi militer dari *power projection* Afrika Selatan di RDK diimplementasikan melalui pembentukan dan pelibatan dalam Force Intervention Brigade di bawah mandat MONUSCO pada 2013. Afrika Selatan menjadi pemain sentral dalam Force Intervention Brigade (FIB) dengan mengirim lebih dari seribu prajurit, helikopter militer, dan senjata artileri, serta menerima mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk

menetralkan kelompok-kelompok bersenjata atau pemberontak seperti M23 di RDK (Namangale, 2015). Operasi bersama FIB dan militer Kongo yang berhasil mengalahkan M23 pada akhir 2013 memperlihatkan kemampuan Afrika Selatan untuk mengonversi sumber daya militer dan pengaruh diplomatiknya menjadi upaya langsung di medan konflik yang jauh dari perbatasan langsung dari negara Afrika Selatan. Di samping aspek militer, Afrika Selatan juga menjalankan *power projection* melalui diplomasi ekonomi yang terstruktur. Penandatanganan nota kesepahaman dan *treaty* terkait Grand Inga, disertai ekspansi perusahaan-perusahaan Afrika Selatan di sektor pertambangan, jasa keuangan, konstruksi, dan telekomunikasi di RDK seperti AngloGold Ashanti, De Beers, Anglo Vaal, BHP Billiton, JIG Mining, Metorex, Kumba Resources, dan Mwana Africa, memperlihatkan pola keterlibatan yang memadukan agenda stabilisasi politik dengan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi kepentingan bisnis nasional (Gbaya, 2015). Pola ini sering dipahami sebagai *peace for profit*, di mana dukungan terhadap proses perdamaian dan keamanan di RDK berlangsung paralel dengan upaya memperluas dan melindungi jaringan kepentingan ekonomi Afrika Selatan di negara tersebut.

Kebijakan Afrika Selatan di RDK juga dibingkai dalam wacana Ubuntu Diplomacy dan solidaritas Afrika untuk memberi legitimasi normatif terhadap *power projection* yang dijalankan. Pemerintah Afrika Selatan menekankan pentingnya stabilitas RDK bagi keberhasilan integrasi regional SADC dan bagi terwujudnya visi African Renaissance yang menempatkan perdamaian dan pembangunan sebagai dua pilar utama kebangkitan Afrika (Geldenhuis, 2016). Melalui kerangka ini, intervensi militer dan dukungan politik terhadap pemerintah RDK dipresentasikan sebagai kontribusi terhadap agenda kolektif Afrika, bukan sekadar ekspresi kepentingan nasional sempit dari Afrika Selatan. Dengan demikian, Afrika Selatan secara sadar menempatkan tindakannya dalam bingkai moral Diplomasi Ubuntu yang didasarkan pada nilai *interconnectedness* dan tanggung jawab bersama. Secara keseluruhan, kasus RDK memperlihatkan bagaimana stabilitas *state borders* yang dimiliki Afrika Selatan memungkinkan Afrika Selatan untuk memindahkan fokus dan sumber daya untuk melakukan *power projection* jarak jauh yang memadukan instrumen militer, diplomatik, dan ekonomi. Ubuntu Diplomacy dalam konteks ini digunakan sebagai kerangka naratif untuk membenarkan keterlibatan aktif tersebut, tetapi dalam praktiknya banyak didasari pada pertimbangan geostrategis berupa tujuan keamanan energi, perlindungan ekspansi korporasi dan tujuan geopolitik kawasan. Dengan

demikian, *power projection* Afrika Selatan di RDK menjadi wujud bagaimana *geostrategy* jarak jauh dapat dilakukan bilamana suatu negara mempunyai *state border* yang stabil.

CONCLUSION

Penerapan Ubuntu Diplomacy yang didasarkan pada dokumen White Paper *Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu* merupakan implementasi *geostrategy* Afrika Selatan dengan arah *power projection* yang ditujukan ke RDK. Sejak 2011, Afrika Selatan tidak lagi hanya berfokus melakukan *power projection* pada ke-enam negara tetangga terdekatnya di Afrika bagian Selatan, tetapi Afrika Selatan mulai mengalokasikan sumber daya diplomatik, militer dan ekonomi untuk melakukan *power projection* ke RDK yang berada di kawasan Central Sub-Saharan Africa. Selain itu, dalam kasus *power projection* ke RDK, implementasi *power projection* yang dibingkai dalam kerangka *Ubuntu Diplomacy* diimplementasikan oleh Afrika Selatan dengan memberikan dukungan politik terhadap rezim Joseph Kabila melalui keterlibatan dalam proses pemilu 2011. Selain itu, Afrika Selatan juga memiliki peran sentral dalam pembentukan dan operasionalisasi *Force Intervention Brigade* (FIB) di bawah mandat PBB untuk melakukan proses perdamaian di RDK pada 2013. Di saat yang sama, Afrika Selatan mendorong kerja sama ekonomi strategis melalui proyek pembangkit listrik tenaga air Grand Inga dan ekspansi korporasi Afrika Selatan di sektor pertambangan, telekomunikasi, ritel, konstruksi, dan jasa keuangan di RDK. Dengan demikian, Ubuntu Diplomacy berfungsi sebagai kerangka normatif yang membingkai praktik *power projection* Afrika Selatan di RDK.

Implementasi *geostrategy* tersebut dimungkinkan oleh konfigurasi *state borders* Afrika Selatan yang relatif stabil. Analisis terhadap perbatasan dengan Botswana, Namibia, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Zimbabwe menunjukkan bahwa Afrika Selatan tidak menghadapi ancaman militer konvensional yang signifikan dari negara-negara tetangganya. Hubungan politik yang umumnya bersifat *amity* dan didukung dengan adanya faktor geografis penghalang alam seperti Gurun Kalahari dan Sungai Orange, serta dengan stabilnya hubungan ekonomi dan moneter dalam kerangka SACU dan SADC kemudian menurunkan risiko konflik antara Afrika Selatan dengan ke-enam negara tetangganya. Persoalan yang muncul di perbatasan terutama terkait isu sosial-ekonomi dan keamanan non-tradisional, seperti migrasi ilegal, penyelundupan senjata dan narkoba, serta pencurian kendaraan yang sudah dilakukan upaya penanganan

melalui operasi bersama di perbatasan dan kerja sama keamanan lintas negara. Konfigurasi *state border* yang stabil ini membuat Afrika Selatan tidak perlu memfokuskan kapasitas militernya di *state borders*, sehingga Afrika Selatan dapat memindahkan fokus dan sumber daya untuk melakukan *power projection* di RDK.

Dengan demikian, studi kasus Afrika Selatan di RDK memberikan implikasi teoretis bahwa tesis Grygiel tentang *state borders* yang relatif stabil membuka ruang bagi negara untuk melakukan *power projection* dengan jangkauan yang lebih jauh sebagai *geostrategy*. Dalam konteks Afrika Selatan, stabilitas perbatasan darat menjadi prasyarat struktural bagi efektivitas penerapan Ubuntu Diplomacy sebagai instrumen *geostrategy* yang memungkinkan negara ini memproyeksikan kekuatan politik, keamanan, dan ekonomi hingga ke RDK. Secara keseluruhan, praktik Ubuntu Diplomacy di RDK menunjukkan bahwa Afrika Selatan berhasil memanfaatkan kondisi *state borders* yang stabil untuk memperluas jangkauan *power projection* sebagai *geostrategy* dan mengonsolidasikan posisinya sebagai *regional power* di kawasan Afrika. Meski demikian, artikel ini memiliki limitasi karena seluruh analisis bertumpu pada data sekunder, sehingga tidak dapat menangkap secara langsung dinamika pengambilan keputusan di tingkat elite, persepsi aktor domestik, maupun evaluasi operasional di lapangan terkait efektivitas *power projection*. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas dengan menelusuri dampak dan implikasi *power projection* Afrika Selatan terhadap RDK hingga kondisi terkini, termasuk konsekuensinya terhadap stabilitas politik dan keamanan di RDK, posisi Afrika Selatan dalam diplomasi kawasan, serta keberlanjutan kepentingan ekonomi Afrika Selatan dalam konteks perubahan dinamika konflik dan tata kelola regional.

REFERENCES

- Adebajo, A., & Virk, K. (2017). FOREIGN POLICY IN POST-APARTHEID SOUTH AFRICA. Bloomsbury Publishing.
- Coplan, D. B. (2001). A RIVER RUNS THROUGH IT: THE MEANING OF THE LESOTHO–FREE STATE BORDER. *African Affairs*, 100(398), 81–116. <https://doi.org/10.2307/3518373>
- Firepower, G. (2025). AFRICAN MILITARY STRENGTH (2025). Global Firepower. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing-africa.php>
- Flemes, D. (2009). REGIONAL POWER SOUTH AFRICA: CO-OPERATIVE HEGEMONY CONSTRAINED BY HISTORICAL LEGACY. *Journal of*

- Contemporary African Studies*, 27(2), 135–157.
<https://doi.org/10.1080/02589000902867238>
- Gbaya, D. M. (2015). SOUTH AFRICA'S FOREIGN POLICY TOWARD THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO: FROM NONINTERVENTION TO INTERVENTION [Tesis, University of the Witwatersrand].
- Geldenhuis, D. (2016). SOUTH AFRICA: THE IDEA-DRIVEN FOREIGN POLICY OF A REGIONAL POWER. Dalam *Regional Leadership in the Global System* (hlm. 151–168). Routledge.
- Godehardt, N., & Nabers, D. (2011). REGIONAL POWERS AND REGIONAL ORDERS. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203815984>
- Government of South Africa. (2011). WHITE PAPER ON SOUTH AFRICAN FOREIGN POLICY: BUILDING A BETTER WORLD—THE DIPLOMACY OF UBUNTU. Government of South Africa. <https://www.gov.za/documents/white-papers/white-paper-south-african-foreign-policy-building-better-world-diplomacy>
- Grygiel, J. J. (2011). GREAT POWERS AND GEOPOLITICAL CHANGE. Johns Hopkins University Press.
- Habib, A. (2009). SOUTH AFRICA'S FOREIGN POLICY: HEGEMONIC ASPIRATIONS, NEOLIBERAL ORIENTATIONS AND GLOBAL TRANSFORMATION. *South African Journal of International Affairs*, 16(2), 143–159. <https://doi.org/10.1080/10220460903265857>
- Hadebe, S., & Dlamini, S. (2019). SOUTH AFRICA'S FOREIGN POLICY TOWARDS THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC). Dalam *Foreign Policy Posture in Post-Apartheid South Africa: Consistencies and Ambiguities* (hlm. 94). Cambridge Scholars Publishing.
- Hennop, E., Jefferson, C., & McLean, A. (n.d.). THE CHALLENGE TO CONTROL: SOUTH AFRICA'S BORDERS AND BORDERLINE. Institute for Security Studies.
- Kappel, R. T. (2010). ON THE ECONOMICS OF REGIONAL POWERS: COMPARING CHINA, INDIA, BRAZIL, AND SOUTH AFRICA. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1679684>

- Klotz, A. (2016). BORDERS AND THE ROOTS OF XENOPHOBIA IN SOUTH AFRICA. *South African Historical Journal*, 68(2), 180–194. <https://doi.org/10.1080/02582473.2016.1153708>
- Leininger, J. (2017). “ON THE TABLE OR AT THE TABLE?” G20 AND ITS COOPERATION WITH AFRICA. *Global Summitry*, 3(2), 193–205. <https://doi.org/10.1093/global/guy010>
- Limits, S. (2023a). BOTSWANA–SOUTH AFRICA LAND BOUNDARY. Sovereign Limits. <https://sovereignlimits.com/boundaries/botswana-south-africa-land>
- Limits, S. (2023b). ESWATINI–SOUTH AFRICA LAND BOUNDARY. Sovereign Limits. <https://sovereignlimits.com/boundaries/eswatini-south-africa-land>
- Limits, S. (2023c). LESOTHO–SOUTH AFRICA LAND BOUNDARY. Sovereign Limits. <https://sovereignlimits.com/boundaries/lesotho-south-africa-land>
- Limits, S. (2023d). MOZAMBIQUE–SOUTH AFRICA LAND BOUNDARY. Sovereign Limits. <https://sovereignlimits.com/boundaries/mozambique-south-africa-land>
- Limits, S. (2023e). NAMIBIA–SOUTH AFRICA LAND BOUNDARY. Sovereign Limits. <https://sovereignlimits.com/boundaries/namibia-south-africa-land>
- Maharaj, R., Moonasar, D., Baltazar, C., Kunene, S., & Morris, N. (2016). SUSTAINING CONTROL: LESSONS FROM THE LUBOMBO SPATIAL DEVELOPMENT INITIATIVE IN SOUTHERN AFRICA. *Malaria Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12936-016-1453-9>
- Mamokhere, J., & Chauke, K. R. (2020). THE MULTIPLICITY OF CHALLENGES FACED BY SOUTH AFRICAN BORDERS: A CASE OF LIMPOPO PROVINCE. *Journal of Public Affairs*, 20(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2123>
- Mlambo, D. N., & Adetiba, T. C. (2019). POST-1994 SOUTH AFRICA’S PEACEKEEPING AND MILITARY INTERVENTION IN SOUTHERN AFRICA. *Journal of Public Affairs*, 20(1). <https://doi.org/10.1002/pa.1984>
- Moyo, I. (2019). ON BORDERS AND THE LIMINALITY OF UNDOCUMENTED ZIMBABWEAN MIGRANTS IN SOUTH AFRICA. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 18, 1–15. <https://doi.org/10.1080/15562948.2019.1570416>
- Namangale, C. (2015). DYNAMICS OF CONFLICT MANAGEMENT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO. *PRISM*, 5(2), 72–83. <https://doi.org/10.2307/26470399>

- Peberdy, S. A. (2000). BORDER CROSSINGS: SMALL ENTREPRENEURS AND CROSS-BORDER TRADE BETWEEN SOUTH AFRICA AND MOZAMBIQUE. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 91(4), 361–378. <https://doi.org/10.1111/1467-9663.00124>
- Scholvin, S. (2016). THE GEOPOLITICS OF REGIONAL POWER: GEOGRAPHY, ECONOMICS AND POLITICS IN SOUTHERN AFRICA. Routledge.
- Smith, K., & Maberu, F. (2024). THE SEARCH FOR GLOBAL–REGIONAL POWER: SOUTH AFRICA IN AFRICA AND THE WORLD. Dalam J. A. Braveboy-Wagner (Ed.), *Diplomatic Strategies of Rising Nations in the Global South* (hlm. 133–155). Springer. https://doi.org/10.1007/9783031526299_5
- Statista. (2025). GDP IN AFRICA BY COUNTRY 2025. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1120999/gdp-of-african-countries-by-country/>
- Tonheim, M., & Swart, G. (2015). AFRICA’S PRE-EMINENT PEACEMAKER? AN APPRAISAL OF SOUTH AFRICA’S PEACEMAKING ROLE IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO. NOREF—Norwegian Peacebuilding Resource Centre.
- Williams, R. (2002). INTEGRATION OR ABSORPTION. *African Security Review*, 11(2), 17–25. <https://doi.org/10.1080/10246029.2002.9628127>
- Wotela, K., & Letsiri, C. (2015). INTERNATIONAL MOVEMENTS, POST-APARTHEID DISPENSATIONS AND ILLEGAL IMMIGRATION INTO SOUTH AFRICA. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 11(4). <https://doi.org/10.4102/td.v11i4.46>